**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
OLEH DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN
DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh :Redyka Nurhediandisyah

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita,SH.,MH

Alamat: Jalan Sari Amin Nomor. 46, Kec. Sail, Pekanbaru

Email: redykanurhediandisyah@gmail.com

ABSTRACT

In the development of today's society, along with the increasing development of technology, transportation, information and communication, so that it has an impact on the pattern of people's lives. These developments not only have a positive impact but have a negative impact, such as the behavior of irregularities in society, namely acts of terror or terrorism. The Police have an Intelligence Directorate in charge of maintaining security. The Directorate of Intelligence Security as part of the dynamic structure of police activities has an important and strategic role in helping to prevent terrorism. The purpose of this thesis is to know the Terrorism Crime Prevention Efforts by the Directorate of Regional Security Intelligence in the Riau Regional Police.

This research is sociological or empirical research, namely the type of research that uses community assumptions in looking for facts that occur in the field to answer an existing problem. This research was conducted in the jurisdiction of the Riau Regional Police. while the population and sample are parties related to the problems examined in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data. The technique of collecting data in this study was through interviews and literature review.

From the results of the research the authors concluded, first the role of the Directorate of Security Intelligence in Efforts to prevent terrorism in the Riau Regional Police, namely conducting investigations by providing information or information material called intel products to the User. in the form of information reports, special information, and assignment report. Terrorism Crime Prevention Efforts by the Directorate of Security Intelligence in the Riau Regional Police are by pre-emptive or preventive measures, prevention efforts that are carried out are to deal with former terrorism prisoners and early detection of groups that can fall prey to terrorism groups, related agencies such as the National Counterterrorism Agency and Detachment 88 also cooperates with each other in efforts to prevent terrorism by actively disseminating the dangers of terrorism to the public.

It is expected that all law enforcement agencies will be more maximal in making prevention efforts against these crimes, by increasingly conducting counseling on the dangers of terrorism. The relevant government must also coordinate with relevant institutions engaged in counter-terrorism efforts so that the solutions to the obstacles encountered by field personnel can be found together.

Keywords: Ditintelkam - Police - Prevention - Terrorism

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.¹

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan terorisme sebenarnya telah di gabung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 187 yang mengatur tentang kejahatan yang berkenaan dengan peledakan, kebakaran dan banjir serta pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan. Aturan itulah yang didahulunya dipakai untuk menjerat pelaku perusak atau pengebom yang terjadi di wilayah Indonesia. Namun sejak tahun 1999, pemerintah Indonesia telah menyusun naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum disahkan terjadi peristiwa Bom di Bali, sehingga kebutuhan akan adanya satu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi kenyataan.²

Sedangkan fungsi teknis kepolisian intelijen keamanan merupakan suatu polri yang tersusun secara hierarki mulai dari tingkat pusat sampai tingkat wilayah, susunan organisasi tersebut dimulai dari tingkat Mabes Polri dengan sebutan Badan Intelijen Keamanan, untuk ditingkat kepolisian daerah disebut Direktorat Intelijen Keamanan,

ditingkat Polsek disebut dengan Unit Intelijen Keamanan.³

Dalam pencegahan Tindak Pidana Terorisme seperti yang disebutkan dalam Pasal 43A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme yaitu:

1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.
2. Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
3. Pencegahan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Kesiapan nasional
 - b. Kontra radikalisisasi
 - c. Deradikalisisasi

Dalam metodologi penelitian hukum sosiologis/empiris dikenal dengan adanya istilah yakni *dassolene* dan *dasein*, dalam hal ini jika dikaitkan dengan fungsi intelijen berdasarkan penelitian ini maka yang dikategorikan *dassolene* adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perkap badan intelijen kapolri nomor 3 Tahun 2013 dinyatakan bahwasannya.

Tugas dan kegunaan intelijen kepolisian adalah mencegah dan terungkannya ancaman usaha-usaha dan kegiatan pihak lain yang berniat melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan, ancaman, terhadap stabilitas keamanan ketertiban masyarakat. Ketentuan secara normatif atau tekstual diatas kontradiktif dengan kenyataan/implementasinya di kepolisian daerah Riau yang ternyata justru gagal dalam mencegah terjadinya serangan terorisme di Polda dan mengakibatkan korban jiwa dari anggota Kepolisian daerah Riau.

Dari data pra penelitian yang diperoleh dari bagian Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau didapatkan data sebagai berikut.

¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme (Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilindonesia)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm .61.

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 35.

³ *Fungsi Teknis dan Manajemen Operasional Intelkam*, Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, 2009, hlm. 57.

Tabel I.1
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Terorisme
Di Kepolisian Daerah Riau

No	Tahun	Lokasi	Pelaku	Korban	Keterangan
1	2000	Gereja HKBP	1	112	-16 korban tewas - 96 luka-luka
2	2018	Polsek Dumai	20	-	Tempat latihan dan perakitan Bom
3		Polsek Kampar	5	-	Tempat latihan teroris
4		Unri	3	-	Dijadikan tempat perakitan Bom
5		Polda Riau	4	4	-2 wartawan terluka -1 polisi terluka - 1 polisi meninggal
	Jumlah		35	116	

Sumber data: Bagian Intelijen Keamanan Kepolisian Riau. Di peroleh 7 November saat melakukan Prariset.

Berdasarkan tabel diatas, kejahatan Terorisme yang tercatat di Kepolisian daerah Riau Pada Tahun 2000 banyak yang mengalami korban dan pada Tahun 2018 banyaknya tempat-tempat latihan terorisme yang diberhasil ditemukan oleh pihak Intelijen Keamanan daerah Riau

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana upaya Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau dalam mengungkap kendala dalam melakukan pencegahan dini (*early detection*) terjadinya tindak pidana terorisme, cara pendeteksian terorisme, penegak hukum dari Kepolisian Daerah serta perkembangan data tindak pidana terorisme pada Kepolisian Daerah Riau. Untuk itu perlu diteliti tentang Upaya Direktorat Intelijen Keamanan sebagai penelitian hukum mengenai tindak pidana terorisme dilingkungan Kepolisian Daerah Riau.

Direktorat Intelijen Keamanan berhasil menangkap pelaku terduga perakitan Bom di kampus Universitas Riau yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2018. Namun pada saat terorisme terjadi di Kepolisian Daerah Riau Direktorat Intelijen Keamanan tidak berhasil

mencegah terjadi terorisme bahkan salah seorang anggota kepolisian menjadi korban.⁴

Pada saat wawancara dengan Bapak IPDA Syahrial selaku Kasat Intelkam Kepolisian Daerah Riau, bagian Direktorat Intelijen Keamanan sering mendapatkan informasi mengenai kejahatan-kejahatan khususnya kejahatan terorisme, dari 2 kasus yang benar-benar terjadi tindak pidana terorisme yang tercatat di Kepolisian Daerah Riau hanya terjadi 2 kali terorisme diantaranya di Gereja Huria Kristen Bapak Protestan (HKBP) dan Di Kepolisian Daerah Riau.

Dari lokasi terjadi terakhir tindak pidana terorisme pada tahun 2018 di Kepolisian Daerah Riau terjadi terorisme dan mengakibatkan 1 anggota kepolisian meninggal, 1 anggota polisi terluka dan 4 orang diduga terorisme meninggal, serangan ini terjadi pada sekitar pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan di Kepolisian Daerah Riau*".

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah upaya Direktorat Intelijen Keamanan dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Kepolisian Daerah Riau?
2. Apakah hambatan Direktorat Intelijen Keamanan dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui upaya Direktorat Intelijen Keamanan dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Kepolisian Daerah Riau?
- b) Untuk mengetahui hambatan Direktorat Intelijen Keamanan dalam pencegahan terorisme di Kepolisian Daerah Riau?

2. Kegunaan Penelitian

⁴ Wawancara dengan Bapak Ipda Syahrial Ps panit V Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Intelkam Polda Riau bertempat di Polda Riau, Pada tanggal 6 November 2018

- a) Bagi Penulis, untuk memperluas dan menunjang perbendaharaan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Bagi Dunia Akademik, dapat dijadikan rujukan dan pembandingan bagi para sarjana hukum maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Riau.
- c) Bagi Penegak Hukum, dapat memberikan masukan untuk penegakan dan pemberantasan Tindak Terorisme kedepannya.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Hukum Pidana

Tindak pidana adalah suatu bentuk pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis yang terdapat dalam pengertian hukum.⁵ Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun tingkat daerah.⁶

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-undang yang beri sanksi berupa sanksi pidana.⁷

Perbuatan tindak pidana tidak sama dengan perbuatan biasa, perbuatan pidana ini disebut dengan “*delik*”, yaitu suatu

perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang.⁸

Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu.⁹

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 4) Pelakunya diancam pidana.

Oleh karena itu dapat dirumuskan dari pengertian tindak pidana sebagai suatu tindakan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan, tertentu, yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.

Dari pengertian tindak pidana di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tindak pidana sama halnya dengan pengertian *strafbaar fait, delict*, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan lain sebagainya.

2. Teori Penegak Hukum

Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari membahas efektivitas hukum, yaitu berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memnuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri, (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.¹⁰

Penegakan hukum adalah kegiatan yang meyerasikan hubungan nilai-nilai

⁵ Hannah Hengkel, “Let Them Frye Hearings for Determination of “Mental Disorders” In the Sexually Violent Person Act”, *Jornal of Criminal Law and Criminology*, Vol 107, No 3, 2017

⁶ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 100

⁸ Aswani Adam dan Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, hlm. 103.

⁹ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.71

¹⁰ Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Dimulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Oktober 2012, hlm. 2.

yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹¹

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang memyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mata dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.¹² Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam hukum acara pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum yang baik, masalah penegakan hukum baik secara *inaabstracto* maupun *inconcreto* merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.¹³

Dalam mencegah tindak pidana terorisme di perlukan teori *preventif* dan *represif*. *Preventif* adalah Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga

dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya non- penal. Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. *Represif* adalah Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (social defence) agar masyarakat dapat terhindar dari keja-hatan atau setidak-tidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁴

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dalam masyarakat.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Upaya adalah suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹⁶
2. Pencegahan adalah suatu cara atau tindakan mencegah; penolakan.¹⁷
3. Tindak Pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap

¹⁴ Hery Firmansyah, "Upaya Penaanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia" *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.23, juni 2011 diakses 24 November 2018.

¹⁵ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 55.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), hlm. 995.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2014 hlm. 220.

¹¹ Soerjono Soerkanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹² Soerjono Soerkanto, *Op. Cit*, hlm. 5.

¹³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam, Penaggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm.18.

perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

4. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁹
5. Teroris adalah pelaku atau orang yang melakukan suatu perbuatan.²⁰
6. Direktorat Intelijen Keamanan adalah tenaga ahli pemerintah dalam pengumpulan eksploitasi data dan informasi.²¹
7. Kepolisian Daerah adalah pelaksana tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia di wilayah provinsi yang berada dibawah Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi penelitian ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap

data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.²²

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang di perlukan maka penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Riau. Yaitu pada bagian Direktorat Inteligen Keamanan Kepolisian Daerah Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Riau karena yang pernah terjadi Tindak Terorisme di Kepolisian Daerah Riau dan mengetahui upaya pencegahan serangan terorisme oleh pihak Direktorat Inteligen Keamanan Kepolisian daerah Riau, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²³ Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu:

- 1) Kanit V Direktorat Inteligen Keamanan daerah Riau
- 2) Ps. Panit V Direktorat Inteligen Keamanan daerah Riau
- 3) Anggota Direktorat Inteligen Keamanan daerah Riau

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁴ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*. Metode Purposive adalah menetapkan jumlah sampel yang

¹⁸ Satjpto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

¹⁹ Yuriadi, "Tembak ditempat Oleh Anggota Densus & Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Pelaku", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2 Oktober 2015, hlm. 1.

²⁰ Ari Wibowo, *Op. Cit*, hlm. 1.

²¹ Faisal Riza, "Peranan Direktorat Inteligen Keamanan (Dalam Penanganan Kejahatan Dengan Menggunakan Senjata Api)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Pasca Universitas Syiah Kuala, Aceh, Vol. 4, No. 2 Mei 2016, hlm. 19

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 35-42.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm.44.

²⁴ *Ibid*, hlm. 121.

mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

N O	Responden	Populasi	Sampel	Perentase
1	Kanit V Direktorat Intelligen Keamanan daerah Riau	1	1	100%
2	Ps. Panit V Direktorat Intelligen Keamanan daerah Riau	1	1	100%
3	Anggota Direktorat Intelligen Keamanan daerah Riau	3	3	100%
	Jumlah	5	5	-

Sumber Data: Data Primer Olahan Tahun 2018

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu dengan membagikan kuisisioner penelitian kepada masyarakat Provinsi Riau dalam tindak pidana terorisme dengan wawancara aparat penegak hukum yang terkait dalam penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme di Kepolisian Daerah Riau.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Yaitu terdiri dari: norma atau kaidah

dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari penjabaran yang sampe saat ini masih berkaku.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Inteligen

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Hasil Penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tertier

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/ Interview

Wawancara/ Interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Direktorat Intelligen Keamanan Kepolisian Daerah Riau. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Kuisisioner

Kuisisioner Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.104.

daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya kepada responden, dalam hal ini Masyarakat sekitar yang mengalami terjadinya terorisme sebagai sampel yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai apa yang dilakukannya.

c. Studi kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajak permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan urain kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sutau yang utuh. Dari pembahasan tersebut, ditarik kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Inteligen Keamanan

1. Pengertian Inteligen Keamanan

Secara etimologis inteligen berasal dari *Inteligen* yaitu mempunyai atau menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi, berfikir tajam, cerdas, berakal. *Inteligensi* yaitu daya yang membuat reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik, maupun mental, terhadap pengalaman-pengalaman baru, membuat pengalaman pengetahuan yang telah dimiliki untuk siap dipakai apabila dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi baru (kecerdasan). *Intelijen* yaitu orang

yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang.²⁶

Inteligen adalah bagian rahasia dari angkatan bersenjata yang bertugas menjaga dan menjamin kepentingan-kepentingan negara terhadap unsur-unsur yang ingin merugikan kepentingan tadi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.²⁷

Tugas umum inteligen adalah mengumpulkan, menganalisis dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan.²⁸

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas inteligen di lingkungan Kepolisian, kegiatan operasional inteligen kemandan diklarifikasi dalam 3 bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Kegiatan operasional inteligen keamanan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyektif/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian lainnya.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup inteligen meliputi:

- Inteligen dalam negeri dan luar negeri;
- Inteligen pertahanan dan/atau militer;
- Inteligen kepolisian;
- Inteligen penegakan hukum; dan
- Inteligen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tindak pidana

adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dalam hukum tata usaha negara yang oleh pembentukan Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman

²⁶ Kunarto, *Inteligen Pengertian dan Pemahamannya*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1999, hlm. 19

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ipda Syahrial Ps panit V Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Intelkam Polda Riau bertempat di Polda Riau, Pada tanggal 6 November 2018

pidana.²⁹ Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid onrechtmatigheid*).³⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara *yuridis* atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan yang seperti terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.³¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dengan demikian, menurut Prof. Moeljatno yang dikemukakan oleh Dr. Erdianto unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut³²

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada dipembuat.

3. Macam-Macam Tindak Pidana

Ada Tindak Pidana Umum dan Tindak Khusus.

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan erat dengan berat ringannya ancaman, sifat, dan perumusan suatu ajaran-ajaran umum hukum pidana. Dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan

dengan akibat-akibat hukum yang penting.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan tiga macam pembagian bab, yaitu buku I tentang peraturan umum, buku ke II tentang kejahatan, dan yang ditempatkan dalam buku ke III tentang pelanggaran.³⁴

b. Tindak Pidana Khusus

Dalam tindak pidana khusus ini dikategorikan tindak pidana yang sifatnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ada aturan tersendiri yang menagtur di dalam tindak pidana tersebut. Tindak pidana khusus ini meliputi antara lain:

- a. Terorisme
- b. Narkotika dan *psykotropika*
- c. Korupsi
- d. Perlindungan anak
- e. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- f. Militer
- g. *Money Laundry*
- h. HAM

C. Tinjauan Umum Tentang Terorisme

Terorisme memiliki pengertian yang berbeda dengan makar. Istilah “makar” disebut atau digunakan oleh para ahli hukum pidana Indonesia antara lain Moeljatno dan Engelbrecht untuk mengganti istilah “*aanslag*” dalam bahasa Belanda. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang juga menggunakan kata makar sebagai terjemahan kata *aanslag* yang berarti serangan. Begitu juga dengan R Soesilo yang menyatakan bahwa makar adalah penyerangan, yang biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Menurut Soesilo apabila orang baru melakukan perbuatan persiapan (*vorbereidings handeling*) saja ia belum dapat dihukum. Supaya ia bisa dihukum ia harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*). Untuk *aanslag* tidak

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

³⁰ Ibid

³¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 51.

³² Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 98.

³³ S.R Siantury, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumn Ahaem-Petehaen, 1986, hlm. 228.

³⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1986, Cetakan ke tujuh, hlm. 282.

perlu harus ada perencanaan lebih dahulu, sudah cukup apabila unsur sengaja telah ada.³⁵

Secara etimologi, perkataan “*teror*” berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”.³⁶ Rumusan terorisme secara terminologis, sampai saat ini masih menjadikan perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Provinsi Riau

1. Sejarah singkat Riau
2. Geografi Topografi dan Demografi
3. Pendidikan Penduduk Provinsi Riau
4. Keadaan Ekonomi Provinsi Riau

B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Daerah Riau dan Direktorat Intelijen Keamanan Daerah Riau.

1. Gambaran Umum Kepolisian daerah Riau.
 - a. Lahirnya Kepolisian daerah Riau
 - b. Struktur Organisasi
2. Gambaran Umum Tentang Direktorat Intelijen Keamanan Daerah Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan daerah riau

Menurut J.E Sahetapi kejahatan sebagai suatu gejala yang sudah terlampaui tua usianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil

budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.³⁸

Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 6 adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Sehingga yang menjadi ciri dari suatu tindak pidana terorisme adalah

- a. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
- b. Dilakukan oleh sekelompok tertentu.
- c. Menggunakan kekerasan.
- d. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
- e. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Jadi unsur yang terdapat dalam tindak pidana terorisme adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan yang terjadi aksi teror di Polda Riau dengan menggunakan senjata tajam atau perisai yang mengakibatkan banyak korban luka bahkan 1 anggota Kepolisian meninggal. Selain itu seorang pelaku aksi teror dengan Kesengajaannya untuk ingin memasuki kedalam Polda namun dapat dihadang oleh

³⁵ Erdianto, Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Pelaku, *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 2014, hlm. 257.

³⁶ OC.Kaligis, “*Terorisme Tragedi Umat Manusia*,” 2002, OC. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm. 6.

³⁷ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 85

³⁸ B.Bosu, *Sendi-sendi Krimologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 12.

anggota kepolisian daerah Riau dilihat dari unsur subjek tindak pidana.

Upaya Direktorat Inteligen Kepolisian daerah Riau dalam Tindak Pidana Terorisme yaitu dengan cara membina, semua mantan Narapidana terorisme yang berada di daerah Riau, dengan cara menghimpun mantan tersangka terorisme, kemudian dengan melakukan pemantauan yang dilakukan Direktorat Inteligen Keamanan dari tingkat Polsek, Polres, Kepolisian daerah Riau dan juga melakukan pencerahan kepada mahasiswa sebagai generasi muda yang mudah terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang salah satunya yaitu seperti terjadinya Bom bunuh diri dengan jalan jihat.

Untuk menjalankan kewenangan yang emban kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka dijabarkanlah kewenangan tersebut kepada salah satu fungsi teknik operasional kepolisian yaitu fungsi Inteligen Keamanan untuk mengawasi dan mengendalikan tindak pidana terorisme adapun pola penanggulangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Inteligen Keamanan dalam melakukan penyelidikan tindak pidana terorisme yaitu.

1) Preemtif

upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contoh pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada instansi atau memberikan himbuan kepada masyarakat.

2) Preventif

Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi

serta pengawasan langsung terhadap tempat-tempat rawan tindak pidana terorisme, agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual antara lain dengan tindakan yaitu mencegah agar kondisi geografis indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur keluar masuknya terorisme dengan mengawasi pintu-pintu masuk ke indonesia.

3) Refresif

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera para pelaku terorisme. Bentuk-bentuk kegiatan dilakakukan oleh Polri dalam usaha refresif adalah:

- a. Menempatkan personil ke tempat-tempat rawan terjadinya tindak pidana terorisme
- b. Mengungkap jaringan terorisme
- c. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan aksi tindak pidana terorisme.

Dari pemberitaan dimedia massa, dapat diketahui bahwa perang terhadap terorisme telah diserukan diseluruh dunia mengutuk tindakan terorisme. Kegiatan penyelidikan dengan melakukan penggebrekan ditempat-tempat yang di curigai sebagai tempat persembunyian teroris, atau digunakan sebagai tempat tinggal para pelaku. Dalam KUHP dikenal istilah penggeledahan, yang berarti tindakan penyidik. Penggeledahan dilakukan guna kepentingan penyelidikan.

Mengenai upaya Direktorat Inteligen Keamanan Kepolisian daerah Riau, pada awalnya inteligen keamanan mempunyai data se-provinsi Riau. Data-data inteligen tersebut di *input* menjadi satu. Seperti data dari Kabupaten Kampar, Dumai, Bengkalis dan daerah lainnya yang ada di Provinsi Riau. Melalui koneksi antar Kasat Intel harus jalan untuk mengungkapkan jaringan pelaku tindak pidana terorisme. Kemudian data yang didapat tersebut dipetakan berdasarkan tempat-tempat terjadi nya terorisme, diantara yang benar

terjadi di daerah Riau yaitu di kepolisian daerah Riau, gereja HKBP dan tempat-tempat yang diduga pelaku terorisme melakukan perakitan dan persiapan pengeboman di Kampar lebih tepatnya di desa Gema, Kampus Universitas Riau.³⁹ Dan data yang terjadi Direktorat Inteligen Keamanan daerah Riau, yaitu menewaskan 1 orang anggota kepolisian daerah Riau dan 4 orang pelaku.

Proses kegiatan rekrutmen jaringan/informasi/agen dilakukan dengan kegiatan penggalangan inteligen yaitu kegiatan yang terarah dan berencana dalam upaya menciptakan kondisi tertentudalam waktu tertentu sesuai dengan keinginan yang diinginkan dan menguntungkan kesatuan dalam proses ini dilakukan bagaimana menarik simpati sasaran sehingga sasaran yang akan dijadikan jaringan/informasi/agen menjadi simpatik dan amu mengikuti keinginan personil yang melaksanakan penggalangan.

Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan ini Direktorat Inteligen Keamanan memakai 2 (dua) pola kegiatan yaitu: penggebrekan, pemeriksaan, pemberkasan sampai penyerahan ke jaksa penuntut umum.

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Inteligen Keamanan daerah Riau telah berhasil menggrebek pelaku tindak pidana terorisme di Kampus Universitas Riau, dan setelah terjadi nya tindak terorisme di daerah kepolisian Riau pihak dari kepolisian telah memperketat ketika memasuki Kepolisian daerah Riau.

B. Kendala Direktorat Inteligen Keamanan dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorsime di Kepolisian daerah Riau.

Untuk menentukan keberhasilan dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Daerah Riau diperlukan bagian lain yang bisa membantu Ditintelkam terorisme dalam menyelidiki ada atau tidaknya suatu

perbuatan tindak pidana terorsime yaitu Direktorat Inteligen Keamanan Kepolisian Daerah Riau ini bertugas mencari informasi tentang suatu tindak pidana terorisme, yang kemudian informasi yang didapat oleh Direktorat Inteligen Keamanan tersebut disampaikan kepada Reserse Inteligen Kepolisian Daerah Riau.

Selama itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme Direktorat Inteligen Keamanan daerah Riau, luput dari adanya kendala-kendala. Adapun faktor kendala itu antara lain:

1) Faktor eksternal

a) Sulitnya menjangkau buron

Para pelaku terorisme seringkali pada saat dan setelah terjadinya razia sulit dijangkau oleh Kepolisian daerah Riau mereka dapat melarikan diri secara cepat dan mencari tempat baru.

b) Takutnya memberikan informasi

Masyarakat yang diharapkan dapat bekerja sama dalam mempermudah penyelidikan ternyata masih sedikit yang memberikan informasi atas kejahatan itu, karena masyarakat berfikir informasi yg diberikan dapat membahayakan keselamatan.

2) Faktor Internal

a) Terbatasnya biaya operasional

Persoalan biayapun tidak luput dari hal yang dialami Kepolisian, tidak adanya anggaran khusus atau terbatasnya biaya operasional yang dialokasikan untuk penyelidikan tindak pidana terorisme untuk mengungkap suatu kasus yang memakan sewaktu lama di kepolisian daerah Riau harus mengeluarkan data biaya yang banyak. Sedangkan hal ini masih sulit untuk ditanggulangkan anggaran yang diberikan Kepolisian pertahun.

b) Keterbatasan personel

Banyaknya tindak kejahatan yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau dengan cepatnya, dengan minimnya jumlah personel anggota bagian Inteligen maka hal ini dianggap tidak sebanding Wilayah Riau yang luas dan jaminan keamanan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ipda Syahrial Ps panit V Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Intelkam Polda Riau bertempat di Polda Riau, Pada tanggal 15 Maret 2019

terhadap seluruh masyarakat Provinsi Riau.

- c) Kualitas anggota bagian Inteligen Kepolisian daerah Riau

Masih kurangnya anggota Dit Intelkam khususnya yang memiliki keahlian khusus untuk mendeteksi tindak pidana terorisme, karena dari 5 anggota hanya 2 orang saja yang memiliki pendidikan Inteligen. Sedangkan 3 anggota lainnya hanya memiliki pendidikan kejurusan dasar Inteligen. Selanjutnya kendala lain yang dihadapi Direktorat Inteligen Keamanan.

- a) Pendistribusian laporan inteligen yang bersifat sangat rahasia sehingga laporan yang diberikan untuk Dit Reserse Kriminal Umum hanya bersifat fakta saja dan data terhadap adanya indikasi tindak pidana terorisme. Sedangkan di dalam proses untuk mendapatkan informasi tersebut tidak dijelaskan terutama menyangkut identitas sumber informasi.
- b) Kurangnya sarana dan prasarana atau alat khusus inteligen yang diguna untuk sebagai alat pendukung dalam penyelidikan.

Selain itu kurangnya sinergitas antara pihak Dit Intelkam daerah Riau dengan beberapa instansi terkait dalam terkait dalam kaitannya pembinaan dan pengawasan mantan napi tidak pidana terorisme, kurangnya dukungan dari keluarga mantan napi tindak pidana terorisme terhadap upaya Dit Intelkam daerah Riau dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, sulit melacak jaringan terorisme, deradikalisasi yang belum berjalan optimal dan dari segi sarana dan prasarana.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Direktorat Inteligen Keamanan daerah Riau, dimana Direktorat Inteligen Keamanan berperan sebagai pengumpul data atau bahan keterangan terhadap adanya indikasi tindak pidana terorisme, memberikan pencerahan kepada mahasiswa sebagai generasi muda, melakukan pemanataan dari tingkat Polsek, Polres, dan Kepolisian daerah Riau, selanjutnya sebagai panitia dan untuk menunjang kegiatan pencegahan dalam rangka pengungkapan tindak pidana terorisme Direktorat Inteligen Keamanan Daerah Riau perlu melakukan pembentukan dan pembinaan jaringan agar mudah mendeteksi keberadaan terorisme. Informasi yang didapat oleh Direktorat Inteligen Keamanan Kepolisian daerah Riau berupa Bahan Keterangan (Baket) yang kemudian bahan keterangan tersebut diolah dan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk laporan.
2. Hambatan Direktorat Inteligen Keamanan dalam pencegahan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Hukum Kepolisian daerah Riau, *Pertama* terbatasnya sumber daya manusia. *Kedua* tidak mendukungnya sarana dan prasarana atau alat khusus inteligen yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan penyelidikan. *Ketiga* terbatasnya dana operasional khusus yang dialokasikan untuk penyelidikan tindak pidana terorisme. *Keempat* sulitnya menjangkau buron yang sering kali berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam upaya pencegahan Direktorat Inteligen Keamanan di Kepolisian daerah Riau adalah:

1. Upaya Direktorat Inteligen dan Keamanan Kepolisian daerah Riau dalam pencegahan tindak pidana terorisme sudah maksimal, namun masih harus ditingkatkan kinerja untuk mencari informasi agar tindak pidana terorisme diwilayah Kepolisian daerah Riau dapat di minimalisir.

2. Diharapkan kepada pihak Kepolisian agar segera menindaklanjuti semua informasi atau bahan keterangan yang diberikan oleh Direktorat Inteligen Keamanan Kepolisian daerah Riau Kepala Mapolda Riau mengenai tindak pidana terorisme.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tentraman bebas dari Pengeboman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan dilingkungan tempat tinggalnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam. Aswarni dan zulfikri, 2006, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Pengantar Pidana Internasional*, Eresco, Bandung.
- Bosu, B, 1982, *Sendi-sendi Krimologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Chazami, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Kaligis, OC, 2002, "Terorisme Tragedi Umat Manusia", OC. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Kunarto, 1999, *Inteligen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nawawi, Barda, Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjpto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Sugono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Siantury, S.R, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumn Ahaem-Petehaen.
- Soekarno, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wibowo, Ari, 2012, *hukum pidana terorisme(kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wiyono, R., 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010
- Faisal Riza, 2016, "Peranan Direktorat Inteligen Keamanan (Dalam Penanganan Kejahatan Dengan Menggunakan Senjata Api)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Pasca Universitas Syiah Kuala, Aceh, Vol. 4, No. 2 Mei 2016.
- Hery Firmansyah, 2011, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", Volume 23, *Jurnal Mimbar Hukum* Universitas Gadjah mada, Juni 2011.
- Hannah Hengkel, 2017, "Let Them Frye Hearings for Determination of "Mental Disorders" In the Sexually Violent Person Act", *Jorunal of Criminal Law and Criminology*, Vol 107, No 3.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Timur.

Widia Edoorita, 2012, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Dimulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Oktober.

Yuriadi, 2015, “Tembak ditempatkan Oleh Anggota Densus & Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Pelaku”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2 Oktober 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tingkat Kepolisian Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Registrasi Setum Polri Nomor 12 Tahun 2013)

D. Wawancara

Wawancara dengan *Bapak Ipda Syahrial* Ps panit V Subdit Keamanan Negara (Kamneg)